



## BUPATI LEBAK

- Yth
1. Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lebak;
  2. Para Camat se-Kabupaten Lebak;
  3. Para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Lebak;
  4. Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan se-Kabupaten Lebak;
  5. Para Koordinator Penyuluhan Balai KB se-Kabupaten Lebak;
  6. Para Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Lebak;
  7. Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa se-Kabupaten Lebak

### SURAT EDARAN NOMOR B.100.3.4/7-BID.PPM/VI/2024 TAHUN 2024 TENTANG

#### PELAKSANAAN INTERVENSI SERENTAK PENCEGAHAN STUNTING

Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 menunjukkan penurunan prevalensi balita stunting dari 21,6% tahun 2022 menjadi 21,5% dan peningkatan prevalensi balita wasting dari 7,7% menjadi 8,5%. Menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 400.5.3/3161/Bangda perihal Pelaksanaan kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Daerah dan Surat Gubernur Banten Nomor: B.400.2.5/1228/DP3AKKB/2024 Perihal Pelaksanaan kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Daerah.

Untuk meningkatkan dukungan, koordinasi dan kerja sama pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, puskesmas, sumber daya manusia kesehatan, dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting di posyandu tingkat desa/kelurahan serta memberikan acuan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh TPPS Kabupaten, TPPS Kecamatan dan TPPS Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting kepada seluruh sasaran ibu hamil, balita dan calon pengantin (catin).

Kepada para Kepala OPD terkait diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Bapelitbangda melaksanakan koordinasi dengan para Kepala OPD terkait untuk kesuksesan pelaksanaan Intervensi Serentak Bulan Juni 2024;
2. Kepala Dinkes melaksanakan koordinasi jajaran Rumah Sakit & Puskesmas untuk dapat memfasilitasi rujukan terhadap sasaran yang membutuhkan intervensi lanjutan;
3. Kepala Dinkes melaksanakan koordinasi kepada Tenaga Kesehatan di tingkat lapangan untuk memastikan telah terdata jumlah posyandu, ketersediaan alat antropometri yang terstandar di setiap posyandu, serta kader yang terlatih dalam penggunaan antropometri;
4. Kepala DP3AP2KB melaksanakan koordinasi dengan Balai Penyuluhan KB untuk memastikan para TPK melakukan pendataan, pendampingan dan pengukuran Catin, Ibu Hamil dan Balita serta menginput hasilnya di Elsimil sesuai jadwal yang telah ada;
5. Kepala DPMD melaksanakan koordinasi dengan Para Kepala Desa untuk memastikan Aparatur Desa, Pendamping Desa (PD), Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan sesuai jadwal di wilayahnya masing-masing;
6. Kepala DPMD melaksanakan koordinasi dengan para Kepala Desa untuk memastikan ketersediaan anggaran dalam kegiatan intervensi serentak termasuk di dalamnya apabila diperlukan pelayanan rujukan melalui sumber pendanaan yang memungkinkan;
7. Kepala Dinsos menginventarisir sumber pembiayaan yang memungkinkan digunakan dalam intervensi serentak di tingkat desa;
8. Kepala Dinsos melaksanakan koordinasi dengan jajaran TKSK, PKH dan SDM yang berada di bawah naungannya untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan sesuai jadwal di wilayahnya masing-masing;
9. Semua Kepala OPD menunjuk perwakilannya melakukan monitoring lapangan sesuai jadwal Posyandu yang telah tersedia;

Kepada para Camat selaku Ketua TPPS, diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi dengan Kades, TPK, PKK, Pendamping PKH, TKSK, PD, PLD, KPM melakukan Pendataan jumlah Catin, Ibu Hamil dan Balita secara holistik di wilayah masing-masing menggunakan sumber data dari Puskesmas, KUA, Balai Penyuluhan KB dan Pemerintah desa paling lambat data tersebut sudah terkumpul tanggal 5 Juni Tahun 2024;
2. Melaksanakan koordinasi dengan Kades untuk memastikan TPK dibantu Babinsa mendampingi Catin untuk memeriksakan Kesehatan ke Puskesmas dan hasil pemeriksaan untuk diinput ke dalam aplikasi Elsimil oleh TPK dan petugas Kesehatan, kegiatan ini dilaksanakan Tanggal 1 – 25 Juni 2024;
3. Melaksanakan koordinasi dengan Kades, TPK, PKK, Pendamping PKH, TKSK, Babinsa, PD, dan KPM, menyisir Ibu Hamil dan Balita datang ke Posyandu untuk diukur serta diinput di e-PPGBM pada hari yang sama, kegiatan ini dilaksanakan Tanggal 1 – 25 Juni 2024;
4. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Puskesmas, Koordinator Balai penyuluhan KB dan Kades untuk memastikan semua Posyandu telah tersedia alat antropometri terstandar. Apabila ditemukan terdapat Posyandu yang belum tersedia alat antropometri terstandar maka pihak pemerintah desa terkait mengupayakan ketersediaannya melalui berbagai sumber anggaran yang ada;
5. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Puskesmas, Koordinator Balai penyuluhan KB dan Kades untuk memastikan seluruh Kader Posyandu memiliki keterampilan dalam pengukuran antropometri, apabila ditemukan terdapat Kader yang belum memiliki keterampilan maka segera diberikan pelatihan sebelum melakukan pengukuran oleh Tenaga Kesehatan terlatih;
6. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Puskesmas, Koordinator Balai penyuluhan KB dan Kades untuk memastikan seluruh Kader Posyandu melakukan pengukuran dengan menggunakan Antropometri yang sudah terstandar, apabila dalam jadwal pengukuran yang sudah ditetapkan ada Posyandu yang masih belum menggunakan alat terstandar agar segera dicari alat yang sudah terstandarnya;
7. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Puskesmas, Koordinator Balai penyuluhan KB dan Kades untuk memastikan apabila terdapat hasil pengukuran

- Ibu Hamil dan Balita di Posyandu yang bermasalah tentang status gizi dan memerlukan intervensi lanjutan maka saat itu juga segera dibawa ke fasilitas Kesehatan terdekat untuk mendapat penanganan secara tepat dan cepat;
8. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Puskesmas, Koordinator Balai penyuluhan KB dan Kades untuk memastikan para kader memberikan edukasi kepada Ibu Hamil dan Balita pada saat kegiatan pengukuran di Posyandu, apabila masih terlihat ada kader Posyandu yang belum memberikan edukasi pada saat pengukuran maka segera dilakukan edukasi.
  9. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Puskesmas, Koordinator Balai penyuluhan KB dan Kades untuk memastikan pencatatan hasil pengukuran serta intervensinya ke dalam sistem informasi e-PPGBM dan Elsimil di hari yang sama;.
  10. Bersama Forkopincam, Mitra, Pemerintah Desa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses kegiatan dan memastikan terlaksana sesuai jadwal dan standar 10 pasti yang sudah diuraikan;
  11. Melakukan Koordinasi dengan Para Kades atau pihak lainnya yang memungkinkan untuk memastikan ketersediaan pembiayaan pelaksanaan intervensi serentak termasuk rujukan kasus ke fasilitas layanan Kesehatan;

Atas kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 6 Juni 2024  
Pj.Bupati Lebak,

\${ttd}

Iwan Kurniawan,S.T.MM